

PROCEEDING

THE 2015 INTERNATIONAL SEMINAR ON EDUCATION

Theme:

**“The Uniqueness of Educational Practices
towards Harmonization of the ASEAN
Community in 2015”**

ISBN: 978-602-8043-43-4

Organized by

**Faculty of Teacher Training and Education University of
Bengkulu, Indonesia, joint with Communication Forum
State Faculty of Teacher Training and Education
Indonesia, and School of Education in ASEAN Countries**

**Grage Horizon Hotel, Bengkulu, Indonesia
16-18 January 2015**



PROCEEDING

THE 2015 INTERNATIONAL SEMINAR ON EDUCATION

Theme:

**“The Uniqueness of Educational Practices
towards Harmonization of the ASEAN
Community in 2015”**

ISBN: 978-602-8043-43-4

Organized by

**Faculty of Teacher Training and Education University of
Bengkulu, Indonesia, joint with Communication Forum
State Faculty of Teacher Training and Education
Indonesia, and School of Education in ASEAN Countries**

**Grage Horizon Hotel, Bengkulu, Indonesia
16-18 January 2015**





INTERNATIONAL SEMINAR COMMITTEE
FACULTY OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION
UNIVERSITY OF BENGKULU

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu Phone/Fax : +62736-21186 web: fkip.unib.ac.id e-mail: fkip@unib.ac.id

Certificate of Appreciation

No. 066/305/UN30.7/ISOE/2015

This certificate is awarded to :

ASEP SUNANDAR

as

Presenter

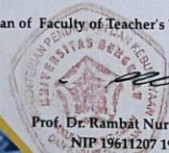
In recognition of valuable contribution to

THE 2015 - INTERNATIONAL SEMINAR ON EDUCATION

Organized by the Faculty of Teacher Training and Education, Bengkulu University, with the theme
"The Uniqueness of Educational Practices towards Harmonization of the ASEAN Community in 2015"
on January 16th- 18th, 2015 at Bengkulu - Indonesia

Dean of Faculty of Teacher's Training and Education,

Bengkulu, January 18th, 2015
Head of Organizing Committee,



Prof. Dr. Rambat Nur Sasongko, M.Pd
NIP 19611207 198601 1 001

THE 2015 INTERNATIONAL SEMINAR ON EDUCATION
FKIP-UNIB-INDONESIA
Prof. Dr. Bambang Satrio, M.Pd.
NIP 19591015 198503 1 016



THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION, ORGANIZATION COMMITMENT AND CLIMATES ON LECTURE PERFORMANCE TO INCREASE ACADEMIC POSITION AT UNIVERSITY OF BENGKULU, Susetyo and Lulu Anastesi Sayekti.....	65
MAPPING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENT SCIENTIFIC INQUIRY ATTITUDE PATTERN IN BENGKULU CITY, Feri Noperman.....	71
APPLYING EDUTAINMENT METHOD TO ENHANCING EARLY CHILDHOOD LANGUAGE SKILL, Nesna Agustriana.....	77
PEMBINAAN INSTRUMEN KESEJAHTERAAN SEKOLAH DI MALAYSIA Kamaruddin bin ilias, Nek Kamal Yeop Yunus, and Che Mohd Zulkifli Che Omar.....	80
IMPLEMENTATION MODEL OF DISCOVERY LEARNING TO IMPROVE THE LINGUISTIC AND NATURALIST INTELEGENCES IN EARLY CHILDHOOD INTRUCTION,Nina Kurniah.....	93
ACADEMIC CULTURE CHANGE AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT POSTGRADUATE INTEGRATED AT FACULTY (CASE STUDY AT FIA UB AND FTI ITB), Asep Sunandar.....	98
THE ASPIRE MODEL AND THE CURRICULUM REFORM IN INDONESIA: A PERSPECTIVE, Asnawi. R. and Amirul Mukminin.....	110
STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION SCHOOLS IN MALAYSIA INDIGENOUS PENAN, Abang Ismail Bin Abang Haji Julhi, Mohd. Mahdi Abdullah and Lucy Rossy Sylvester Wahed Bujang Mi	116
THE INFLUENCE OF TEACHER PERSONALITY COMPETENCE TOWARD WORK MOTIVATION AND PERFORMANCE AMONG TEACHER AT STATE HIGH JUNIOR HIGH SCHOOL IN CITY OF MEDAN Nasrun	128
PENTAKSIRAN DI PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS (PAKK@PAUD) : ISU, CABARAN DAN AMALAN GURU, Mohamed Ayob Hj Sukani and Arfah Hj Abd Karim.....	135
EDUCATING ENTREPRENEURS: THE CHALLENGES ON ENTREPRENEUR-SHIP EDUCATION AND CREATIVE INDUSTRIES FOR THE ASEAN ECONOMY COMMUNITY, Muazza.....	145
CHILDREN CHARACTER BUILDING THROUGH SNAKE AND LADDERS GAME E. Prima.K	150
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAHASA, SENI DAN BUDAYA, BENTUK HARMONISASI DAN KESIAPAN MAYARAKAT ASEAN 2015, Suryadi	155
MANAJEMEN SEKOLAH BERBASIS PARTISIPATIF DALAM PENINGKATAN NILAI AKREDITASI SEKOLAH, Salmi	162
SATISFACTION OF SCHOOL ADMINISTRATORS TOWARDS BEGINNING TEACHERS, Badrul Hisham bin Alang Osman And Mubin bin Md Nor	174
PROMOTING TEACHERS' DISCIPLINE THROUGH TEACHERS' PERSONALITY	

ACADEMIC CULTURE CHANGE AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT POSTGRADUATE INTEGRATED AT FACULTY (CASE STUDY AT FIA UB AND FTI ITB)

Asep Sunandar
asepsun@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe academic culture change and quality assurance system implemented at Postgraduate Integrated at Faculty. Researcher used of qualitative method with case study model. After the integration process, a change in the academic culture as in the case of social values implemented which is integrated in the college, lecturer have accountability to student both S1, S2 and S3, so that there is no different services for three kinds of higher education. Occurs togetherness among all levels of students. Quality assurance beside carried out by units of the university organization which authorized to conduct quality assurance, graduate program established a commission tasked with quality assurance standard of academic quality graduate. The results of the quality assurance action taken followed by the rector or head of study program to be improved. FIA UB implemented quality display with on line system, while FTI ITB develops quality standard refer to international quality board. Postgraduate integrated at two campuses given real describe of higher education autonomy oriented on improving the quality of higher education.

Keywords: *Academic Culture Change, Quality Assurance System.*

1. PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah terdeskripsikannya perubahan budaya akademik dan sistem penjaminan mutu yang diterapkan pada pelaksanaan pascasarjana terintegrasi di fakultas. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Setelah proses integrasi terjadi perubahan budaya akademik seperti dalam hal penerapan nilai-nilai sosial mahasiswa S1, S2 dan S3 sehingga tidak lagi membedakan rasa tanggung jawab terhadap diantara mahasiswa semua tingkatan. Penjaminan mutu selain dilakukan oleh unit organisasi universitas yang berwenang melakukan penjaminan mutu, pascasarjana membentuk komisi penjamin mutu yang bertugas merumuskan standar mutu akademik pascasarjana membentuk komisi mutu ditindaklanjuti dengan tindakan yang dilakukan rektor atau Kaprodi untuk dilakukan perbaikan, FIA UB menerapkan sistem display mutu secara on line, sementara FTI ITB mengembangkan standar mutu mengacu kepada lembaga mutu internasional. Integrasi pascasarjana di kedua kampus telah memberikan gambaran nyata pelaksanaan otonomi perguruan tinggi yang berorientasi pada peningkatan mutu perguruan tinggi.

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah seorang peserta didik menamatkan pendidikan pada jenjang menengah. UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 menyatakan bahwa "Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi". Peraturan tersebut menegaskan adanya sistematisasi keterkaitan dan bersifat prasyarat, siswa dapat menempuh jenjang pendidikan memiliki menyelesaikan proses pendidikan pada jenjang dibawahnya. Sementara itu pendidikan pascasarjana, yang meliputi program magister (master) dan doctoral (doktor) termasuk pendidikan tinggi yang merupakan jenjang lanjutan dari program sarjana.

Penyelenggaraan program pascasarjana diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 50 menyatakan “Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pascasarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu”. Jelas bahwa program pascasarjana di bawah naungan jurusan yang serumpun bidang keilmuannya. Penyelenggaraan program pascasarjana idealnya dilakukan secara terintegrasi dengan jurusan yang menaungi.

Selanjutnya pada tahun 2000an terdapat beberapa perguruan tinggi yang mulai merubah sistem penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di perguruan tinggi masing-masing. Pascasarjana yang awalnya berada di bawah Program Pascasarjana (PPs) telah diubah menjadi di bawah naungan fakultas. Beberapa perguruan tinggi tersebut antara lain Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Brawijaya.

Perubahan ini menimbulkan dampak secara sistemik, yakni perubahan budaya akademik dan perubahan sistem penjaminan mutu. Pada awalnya mahasiswa pascasarjana memiliki lingkungan tersendiri dan terpisah dengan mahasiswa dari program sarjana, maka dengan adanya sistem ini membuat mereka berinteraksi satu sama lain. Pada penyelenggaraan mutu di program sarjana yang awalnya berkebalikan dengan pascasarjana kini tidak ada perbedaan di antara keduanya. Misalnya mengenai layanan administrasi yang eksklusif dan sangat baik di program pascasarjana kini juga dirasakan di lingkungan program sarjana. Tentu hal ini berdampak positif karena membawa pemerataan mutu di seluruh bagian perguruan tinggi.

Integrasi pascasarjana ke fakultas pada dasarnya merupakan penjewantahan dari konsep otonomi kampus. Manajemen pascasarjana di fakultas diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di fakultas serta menguatkan kelembagaan fakultas. Secara esensi konsepsi integrasi pascasarjana di fakultas dikembangkan dengan tujuan untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

Konsep kualitas di perguruan tinggi, pada dasarnya memiliki perbedaan dengan konsep kualitas di lembaga perusahaan atau nirlaba. Manajemen kualitas pendidikan tinggi sangat erat kaitannya dengan terpenuhinya kebutuhan dan keinginan stakeholders pendidikan tinggi. Konsep kualitas terkait pendidikan tinggi bukan terletak pada mudahnya dosen memberikan nilai A atau cepatnya peserta didik lulus, melainkan terletak pada kualitas layanan kelembagaan dan layanan akademik. Layanan kelembagaan meliputi layanan administratif perguruan tinggi mudah diakses, tidak menyita waktu peserta didik, dan menerapkan teknologi informasi. Sementara itu layanan akademik terkait dengan relevansi kurikulum, kualitas akademik sumberdaya dosen, persebaran alumni diberbagai lapangan pekerjaan, dan keberterimaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap alumni.

Sejalan dengan pendapat tersebut (Hassan, 2013:80) memberikan penjelasan “*Quality of education includes teaching, programmes (curricula), research, staffing, students, infrastructure (buildings, facilities and equipment), services to the community and the academic environment*”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk kualitas dalam pendidikan tinggi adalah pengajaran, kurikulum, penelitian, dosen, peserta didik, infrastruktur (gedung, fasilitas dan perlengkapan), layanan masyarakat dan lingkungan akademik. Sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai lembaga berkualitas apabila mampu memberikan layanan terbaik pada aspek-aspek tersebut.

Beberapa penegasan terkait dengan layanan berkualitas dikemukakan oleh beberapa ahli seperti yang dikutip Chen, S.H. (2012: 1282) sebagai berikut:

Levitt (1972) indicated that service quality means service result could conform to set standards. Crosby (1979) considered that service quality is the comparison between customers’ expected service and perceived service. Garvin (1983) addressed that service quality is a subjective perceived quality not an objective quality. Parasuraman (1985) believed that the perception of service quality is the gap between customers’ expected quality and perceived quality, service quality is not just contain the evaluation of service outcome, but also contains the evaluation of service delivered process. Service quality is decided by customers’ subjective experience judgment.

Layanan berkualitas berarti hasil layanan sejalan dengan standar, atau layanan berkualitas merupakan perbandingan antara harapan konsumen dengan layanan yang diterimanya. Kedua pendapat ini memberikan penjelasan bahwa suatu layanan dapat dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan dan juga sejalan dengan harapan konsumen yang dilayani. Kedua konsep ini memberikan landasan dalam merumuskan suatu layanan berkualitas. Dengan adanya standar maka pemberi layanan memiliki pedoman yang jelas dalam menyampaikan layanan, standar yang baku juga akan lebih memudahkan pemberi layanan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang dilayani.

Sesuatu dikatakan berkualitas tidak bisa berjalan secara konsisten, maksudnya suatu layanan lembaga dipandang oleh seseorang berkualitas namun oleh yang lain belum tentu dipersepsi sama. Hal ini sejalan dengan pendapat ketiga kutipan di atas yang menyatakan “*addressed that service quality is a subjective perceived quality not an objective quality*” sesuatu dikatakan berkualitas itu pandangan subjektif bukan pandangan objektif. Artinya memang kualitas itu nisbi tidak kentara, bisa dipersepsi lain oleh beberapa orang konsumen. Walaupun demikian suatu layanan berkualitas pada dasarnya dapat ditetapkan dari *out put* layanan yang diterima konsumen, sehingga dapat dirasakan, dinikmati bahkan diukur.

METODE

Topik penelitian yang dilakukan merujuk pada suatu fenomena aktual yang dinamis dan dapat dialami dengan suatu pendekatan penelitian tertentu, yakni pendekatan kualitatif. Karakteristik yang muncul dari penelitian tersebut adalah fenomena yang kebenarannya dapat ditelusuri serta tidak bisa dinyatakan dalam statistik, mengingat penelitian berfokus pada perubahan yang terjadi pada budaya akademik, dan penjaminan mutu beberapa perguruan tinggi. Karakteristik tersebut sejalan dengan karakteristik pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga, memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Somantri, 2005: 2). Sehingga jelas bahwa penelitian yang merujuk pada pola pengelolaan pascasarjana di fakultas memang sesuai jika diungkap dengan pendekatan kualitatif.

Berdasar pada topik dan karakteristik penelitian yang ada, jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian studi kasus. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Wiyono (2008:77) menjelaskan studi kasus sebagai serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara intensif dan terperinci suatu gejala atau unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, komunitas atau lembaga. Sehingga dari penjelasan tersebut, peneliti memiliki tuntutan tersendiri untuk mendalami situs penelitian dan menentukan jumlah *informan* dalam penelitian yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan strategi untuk memperdalam informasi demi mendapatkan kondisi faktual dari kasus yang diteliti.

Berkenaan dengan topik penelitian yang mengarah dan mendalami suatu pola dalam kelembagaan, maka lebih spesifik jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus organisastoris atau kelembagaan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Berg (2004: 260) “*as the systematic gethering of enough information about a particular organization to allow the investigator insight into the life of the organization*”. Tampak bahwa penjelasan tersebut memperuncing karakteristik utama dari studi kasus kelembagaan. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif studi kasus yang terjadi pada sebuah organisasi yaitu pascasarjana dan fakultas sebagai penyelenggara program pendidikan pascasarjana.

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik taksonomi dari Spradley. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Tahapan analisis ini dilakukan setelah peneliti menemukan domain-domain yang dipandang sebagai domain kunci dari penelitian. Taksonomi berupaya untuk memperinci domain menjadi lebih spesifik dan mendalam. Proses analisis taksonomi oleh Spradley (1997: 185-193) dijelaskan dalam delapan tahap:

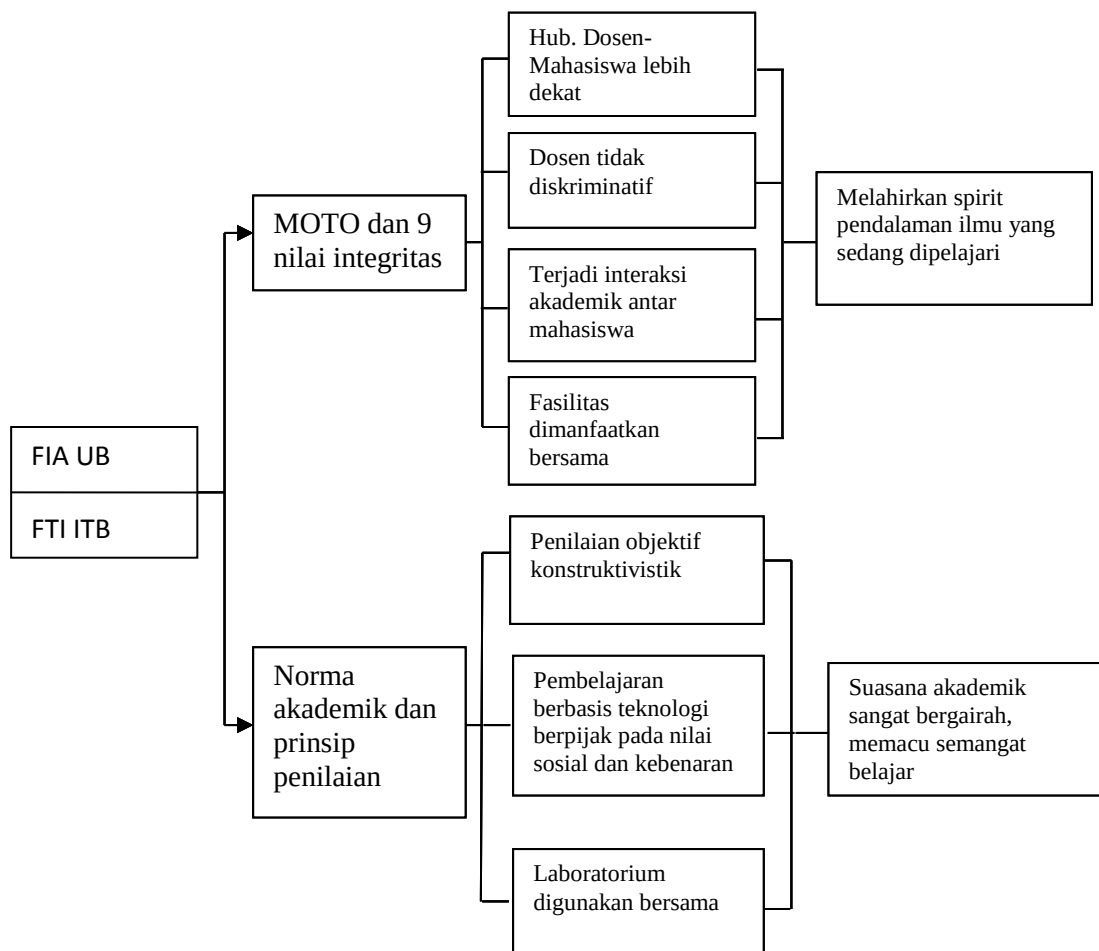
1. Pilih sebuah domain untuk analisis taksonomi
2. Identifikasikan kerangka substitusi
3. Cari subset yang memungkinkan diantara beberapa istilah tercakup
4. Carilah domain yang lebih besar lebih inklusif yang dapat masuk sebagai sebuah subset yang sedang anda analisis
5. Buatlah sebuah taksonomi sederhana

6. Formulasikan pertanyaan struktural untuk membuktikan berbagai hubungan taksonomi dan memperoleh berbagai istilah baru
7. Lakukan wawancara struktural tambahan
8. Buatlah sebuah taksonomi lengkap.

Teknik analisa taksonomi diperjelas kedalam sebuah gambar teknik analisa taksonomi. Dalam konteks ini peneliti memilih menggunakan diagram kotak, dengan pertimbangan mampu memuat penjelasan yang lebih rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian terkait budaya akademik dipaparkan dalam bentuk diagram gambar berikut.



Gambar 1. Temuan Budaya Akademik
Sumber Hasil Analisis Peneliti

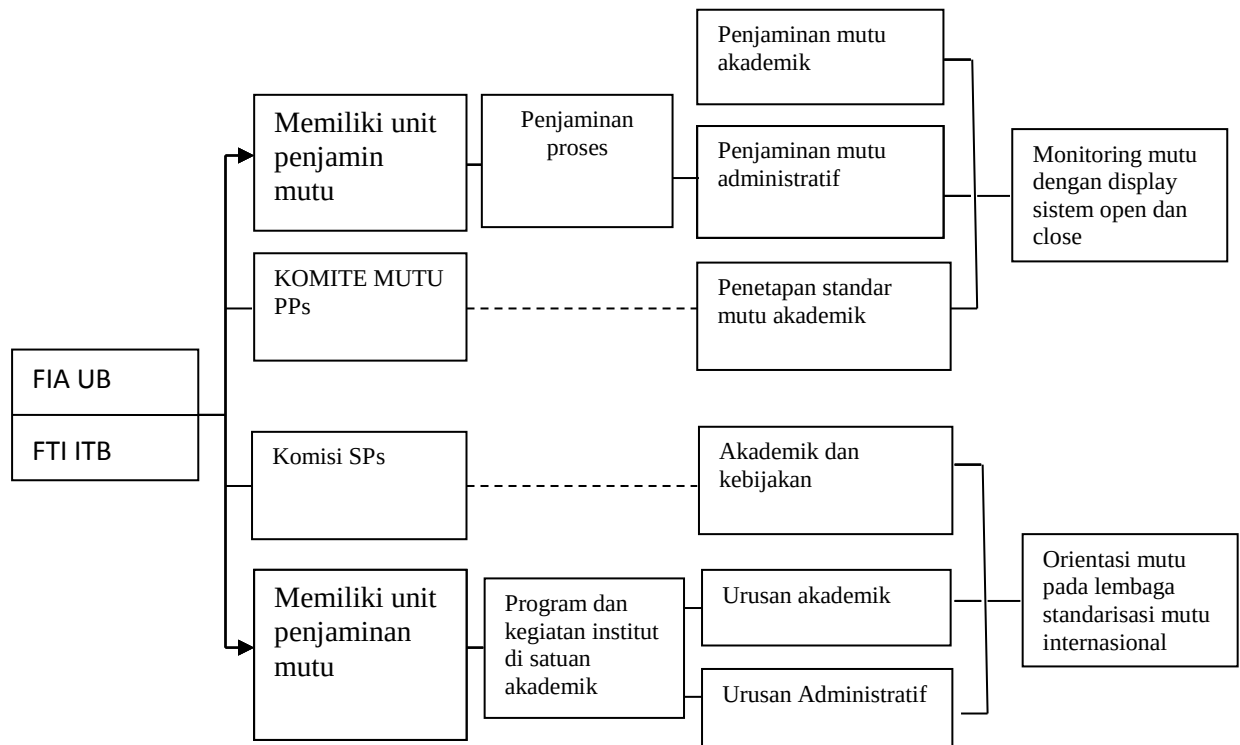
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menetapkan moto, 9 nilai integritas dan maklumat yang menjadi dasar seluruh civitas akademika FIA

dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik. Pengelola kampus memasang ketiga kerangka dasar nilai tersebut di tembok gedung perkuliahan agar semua civitas membaca dan mengamalkannya. Pengaruh perubahan budaya akademik yang dirasakan oleh beberapa informan yang diwawancarai menyatakan, bahwa integrasi PPs ke fakultas membawa spirit yang berbeda dalam hal pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa lebih dekat, dosen tidak membedakan layanan pada seluruh tingkat pendidikan, terjadi interaksi diantara mahasiswa S1, S2 dan S3 dan terjadi pemanfaatan secara bersama fasilitas kampus, seperti perpustakaan, kegiatan perkuliahan bersama dan seminar. Proses tersebut telah melahirkan spirit mahasiswa FIA UB untuk lebih mendalami ilmu yang sedang dipelajari.

Temuan penelitian di FTI ITB menyatakan bahwa Senat Akademik ITB telah menetapkan norma akademik dan prinsip-prinsip penilaian yang dipandang mampu mendorong terwujudnya budaya akademik di kampus biru ITB. Berdasarkan pada norma dan prinsip tersebut terwujudlah sebuah sistem penilaian yang objektif dan konstruktif. Proses pembelajaran di ITB selain mengedepankan muatan teknologi juga tetap memprioritaskan nilai-nilai sosial dan kebenaran. Artinya pembelajaran di ITB tidak hanya mementingkan teknologi mutakhir tetapi tetap mempedomani nilai kebenaran, sehingga lulusan ITB masih tetap berpijak pada budaya dan peradaban sosial masyarakat Indonesia.

Selain ditopang aspek nilai budaya akademik yang tercipta juga didorong oleh situasi pemanfaatan laboratorium secara bersama diantara mahasiswa S1, S2 dan S3. Mayoritas perkuliahan di FTI ITB dilaksanakan di laboratorium, sehingga interaksi diantara mahasiswa lebih banyak terjadi di ruangan tersebut. Kebersamaan yang tercipta pada akhirnya melahirkan suasana akademik yang bergairah dan meningkatkan semangat belajar para mahasiswa.

Temuan penelitian terkait sistem penjaminan mutu dipaparkan dalam bentuk diagram gambar berikut.



Gambar 2. Temuan Sistem Penjaminan Mutu
Sumber Hasil Analisis Peneliti

Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan di kedua kampus yang melaksanakan pascasarjana di fakultas memiliki beberapa persamaan. Semua perguruan tinggi dewasa ini telah memiliki suatu unit organisasi penjaminan mutu. UB dan ITB memiliki unit penjamin mutu yang disebut PJM UB (Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya) sementara di ITB disebut SPM ITB (Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung). Program pascasarjana setiap kampus memiliki suatu unit yang bekerja memikirkan peningkatan mutu pendidikan yaitu komite mutu pascasarjana di UB dan komisi mutu di ITB. Kedua unit organisasi pascasarjana tersebut berperan dalam perumusan standar mutu akademik, Komisi Mutu ITB memiliki peran tambahan yaitu merumuskan kebijakan pengembangan layanan akademik di SPs ITB.

Proses terakhir dari sistem manajemen mutu di kedua kampus tersebut adalah sistem monitoring dan tindaklanjut hasil penjaminan mutu. Di Universitas Brawijaya hasil monitoring mutu disampaikan kepada Kaprodi untuk dilakukan perbaikan, sementara itu untuk diketahui pimpinan PJM memasang monitor mutu

yang mendisplay hasil penjaminan dengan keterangan *open* dan *close*. Keterangan *open* berarti rekomendasi PJM belum dilaksanakan oleh Kaprodi sementara itu keterangan *close* berarti rekomendasi PJM sudah dilaksanakan dan permasalahan sudah teratasi.

Pembahasan Budaya Akademik Pascasarjana Terintegrasi di fakultas

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diperoleh gambaran bahwa yang mampu menciptakan budaya akademik di sebuah perguruan tinggi adalah 1). Nilai-nilai yang ditetapkan secara formal yang menjadi acuan seluruh civitas akademika dalam menjalankan kegiatan pendidikan. 2). Kondisi bangunan dan lingkungan perguruan tinggi juga turut mempengaruhi budaya akademik perguruan tinggi, dan 3). Mekanisme atau prosedural yang harus ditempuh peserta didik dalam mengikuti pendidikan tinggi. Setiap perguruan tinggi memiliki standar dan prosedur tersendiri dalam pelaksanaan proses pendidikan, sehingga hal tersebut menjadi pembeda dengan perguruan tinggi lainnya.

Kebijakan integrasi pascasarjana memunculkan suasana akademik yang berbeda, temuan penelitian ini menunjukkan suasana akademik baru yaitu “kebijakan integrasi dosen menjadi tidak memilah-milah, mengajar di S1, S2 dan S3 sama saja”. Temuan ini mempertegas bahwa dampak dari integrasi adalah dosen tidak lagi berpikiran disparitas antara mengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana. Pada aktor mahasiswa spirit yang terbangun adalah “Tumbuhnya spirit untuk segera menyelesaikan pendidikan”. Semakin membaiknya suasana diantara dosen dan mahasiswa menghasilkan sebuah hubungan personal dan akademik yang semakin baik. Hasil analisa komponensial menunjukkan hubungan diantara dosen dan mahasiswa menghasilkan “hubungan dosen dan mahasiswa menjadi lebih akrab. Bahkan hubungan dosen dan mahasiswa terdapat rasa memiliki terhadap pascasarjana, dimana sebelumnya dosen dan fakultas tidak memiliki rasa memiliki pascasarjana”. Rasa memiliki merupakan kesadaran untuk turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pascasarjana, tumbuhnya rasa memiliki menunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa FIA UB bersama-sama mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan.

Kondisi yang tercipta di FIA UB tentu tidak terjadi dengan sendiri, terdapat beberapa kebijakan yang turut mendorong terciptanya suasana akademik

yang kondusif. Hasil analisa teknik ini menemukan kebijakan pendukung tersebut adalah “Ruang baca tersebut spesial untuk S2 dan S3, tapi kalau S1 *pingin* masuk juga tidak dilarang tapi diprioritaskan untuk S2 dan S3, S1 tidak dilarang”. Kondisi itulah yang selama ini mampu mendorong keadaan yang kondusif dalam pengembangan akademik di kampus FIA UB.

Temuan penelitian di kampus ITB memperoleh data, bahwa ITB juga memiliki nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam kegiatan pendidikan. nilai-nilai yang dimaksud adalah norma akademik dan prinsip-prinsip sistem penilaian hasil belajar mahasiswa. Untuk mencapai objektivitas dalam melaksanakan penilaian hasil belajar, ITB sudah menetapkan “Kebijakan Sistem Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa” yang harus diikuti oleh dosen dan mahasiswa. kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 01/Sk/K01-SA/2008.

Berbagai temuan terkait budaya akademik di kampus FIA UB, FTI ITB dan FIP UPI menggambarkan bahwa ketiga kampus telah mampu menciptakan budaya akademik seperti yang dikemukakan Thamrin (2012: 28) yang menyatakan “budaya akademik mengandung implementasi nilai-nilai seperti nilai-nilai moral, akhlak, budi pekerti, kebenaran, kejujuran, sehingga membangun suasana dan pelaku-pelaku akademis yang bermoral, berakhlak, berbudi pekerti, bernilai kejujuran, kebenaran dalam pemikiran dan perbuatan”. Temuan-temuan penelitian unsur-unsur budaya akademik di ketiga kampus tersebut menegaskan bahwa budaya akademik telah tercipta, dan pelaksanaan program pascasarjana di fakultas telah melahirkan budaya akademik baru yaitu kebersamaan akademik diantara tingkat pendidikan S1, S2 dan S3.

Melengkapi kajian terkait budaya akademik, peneliti mengutip sebuah pendapat yang menyatakan:

we see that these necessary codes would have to include not only formal restrictions like agreeing to avoid plagiarism, but also a general requirement of sincerity, of aiming at getting the research right. Horacek (dalam Twomey, 2009:12).

Menurut pendapat tersebut integritas akademik tidak dimaknai sempit seperti fantasi nostalgia tentang budaya kejujuran yang dilakukan untuk menghindari kepunahan di wahana akademik. Dalam kenyataannya, mereka

membutuhkan bantuan nyata dari kesulitan yang dihadapi. Dibutuhkan suatu kode yang tidak hanya dalam konteks formal seperti halnya persetujuan untuk menghindari plagiarisme, tetapi juga dibutuhkan kaidah keilmuan secara umum yang bertujuan untuk mendapatkan penelitian yang baik. Maksud dari pendapat tersebut adalah integritas akademik itu tidak hanya sebatas pada kejujuran tetapi juga ada hal lain yang harus dilakukan insan akademik yaitu inovasi dan penelitian mendalam untuk menghasilkan ilmu baru. Kaidah-kaidah umum dapat dijelaskan sebagai persyaratan akademik yang harus dipenuhi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang baik.

Budaya akademik yang tercipta harus memberikan implikasi yang luas, budaya tidak hanya berhubungan dengan nilai tetapi budaya juga harus berhubungan dengan inovasi keilmuan. Spirit riset dan pengembangan ilmu merupakan tujuan utama perguruan tinggi. Semakin produktif sebuah perguruan tinggi menghasilkan inovasi dan pengembangan keilmuan maka dapat diindikasikan bahwa budaya akademik yang berkembang sudah sangat baik.

Pembahasan Sistem Manajemen Mutu Pascasarjana Terintegrasi di Fakultas

Sebelum dilakukan pembahasan tentang mutu pendidikan tinggi perlu kiranya di jelaskan batasan mutu dalam konteks perguruan tinggi. Konsep kualitas pendidikan tinggi bukan terletak pada mudahnya dosen memberikan nilai A atau cepatnya peserta didik lulus, melainkan terletak pada kualitas layanan kelembagaan, layanan akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Secara lebih rinci Hassan (2013:80) memberikan penjelasan “*Quality of education includes teaching, programmes (curricula), research, staffing, students, infrastructure (buildings, facilities and equipment), services to the community and the academic environment*”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk kualitas dalam pendidikan tinggi adalah pengajaran, kurikulum, penelitian, dosen, peserta didik, infrastruktur (gedung, fasilitas dan perlengkapan), layanan masyarakat dan lingkungan akademik. Sebuah perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai lembaga berkualitas apabila mampu memberikan layanan terbaik pada aspek-aspek tersebut. Penjelasan tersebut menegaskan komponen apa saja yang menjadi parameter dalam konteks mutu pendidikan tinggi. Perbedaan komponen

mutu dengan jenjang pendidikan lainnya karena perguruan tinggi memiliki keluasan dan spesifikasi tersendiri.

Mencermati berbagai upaya yang dilakukan Program Pascasarjana UB, dan Sekolah Pascasarjana ITB yang memfungsikan lembaga tersebut sebagai penjamin kualitas pendidikan pascasarjana merupakan sebuah respon positif dari prinsip penjaminan mutu yaitu kepuasan pelanggan. Pemikiran ini memiliki relevansi dengan definisi mutu seperti yang dikutip Chen (2012: 1282) dari *Levitt (1972) indicated that service quality means service result could conform to set standards. Crosby (1979) considered that service quality is the comparison between customers' expected service and perceived service.* Pemenuhan kebutuhan pelanggan akan berdampak kepada terpuaskannya pelanggan. Namun dalam dunia pendidikan yang dimaksud terpuaskannya pelanggan bukan karena mudahnya lembaga pendidikan mengeluarkan ijazah kelulusan, atau gampangnya nilai yang diberikan dosen tetapi lebih mengarah kepada terpenuhinya harapan peserta didik akan pengetahuan yang ingin diketahuinya.

Konteks penjaminan kualitas menjadi hal yang sangat strategis dalam pelaksanaan pendidikan tinggi juga dikemukakan dalam tiga strategi yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan pendidikan tinggi.

The quality control for lower-end institutions may become a serious issue in the market-based system. Without quality assurance, more diplomas of college graduation per se will not contribute much either to individual well-being or to social benefit (Kim dan Lee, 2004:32).

Penjaminan kualitas juga menjadi isu penting dalam konteks pasar bebas. Tanpa jaminan kualitas, hasil pendidikan tinggi tidak akan memberikan keuntungan baik pada individu maupun sosial. Pemerintah Korea Selatan sangat menyadari pentingnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Mereka berpikiran bahwa kemajuan negaranya akan sangat bergantung kepada kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Upaya dari pemerintah tersebut menunjukkan bahwa hanya dengan penjaminan kualitas lulusan pendidikan tinggi akan mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara, jika tanpa kualitas lulusan perguruan tinggi tersebut tidak akan mampu berkontribusi pada dirinya apalagi pada bangsanya.

Sejalan dengan strategi yang dilakukan pemerintah Korea Selatan, pemerintah Indonesia juga mempunyai regulasi terkait penjaminan mutu pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dipayungi oleh beberapa regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 91 menyebutkan: (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Menguatkan penjelasan terkait penjaminan mutu pendidikan penulis mengutip peraturan lain yaitu Permendiknas No 63 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan”.

Dalam konteks pendidikan tinggi penjaminan kualitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara”. Aturan tersebut menyatakan esensi pendidikan tinggi yang bermutu, ukurannya yaitu mampu menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikasi ini memberikan isyarat apabila seorang lulusan perguruan tinggi kurang atau bahkan tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka bisa dikatakan kalau perguruan tinggi kurang berkualitas.

Secara operasional proses penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur dalam Pasal 52 ayat (1) “Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan

peningkatan standar Pendidikan Tinggi”. Kegiatan penjaminan dilakukan secara sistemik, yaitu proses penjaminan yang dilakukan secara berkesinambungan dan saling terkait diantara komponen penyelenggara pendidikan tinggi. Proses penjaminan mutu tidak bisa terpisah-pisah atau sebagian, karena pendidikan tinggi merupakan sistem maka proses penjaminan mutunya pun dilaksanakan secara berkesinambungan.

Secara lebih operasional pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara dua tahap yaitu penjaminan mutu internal yang dilakukan institusi pendidikan tinggi dan penjaminan eksternal yang dilaksanakan oleh suatu lembaga bentukan pemerintah. Secara lengkap berikut dikemukakan bunyi Pasal 53 “Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi”.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara melakukan penjaminan mutu pendidikan. Tujuan akhir dari proses penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatnya kecerdasan kehidupan bangsa, hal ini menyiratkan bahwa ukuran kualitas dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah semakin cerdasnya masyarakat Indonesia.

Proses penjaminan kualitas pendidikan tinggi dilakukan dengan cara berpijak kepada buku panduan yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010. Buku panduan menyebutkan terdapat 3 macam kegiatan penjaminan mutu dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia yaitu: 1. Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) 2. Akreditasi perguruan tinggi (oleh BAN PT), 3. Penjaminan mutu (*quality assurance*) (Dikti, 2010:3). Peraturan yang terbaru terkait hal tersebut adalah dikeluarkannya Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pemaparan tersebut menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Regulasi di atas

menegaskan bahwa Indonesia menjalankan sistem pendidikan nasional dengan memperhatikan aspek mutu. Upaya-upaya tersebut akan memiliki dampak positif terhadap mutu pendidikan tinggi apabila pengelola perguruan tinggi memiliki komitmen dan niat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan proses pendidikan berkualitas.

Mencermati hasil temuan penelitian di kedua lokasi, selain kampus-kampus tersebut memiliki lembaga yang khusus melakukan penjaminan mutu pendidikan, mereka juga memiliki mekanisme tersendiri dalam memacu peningkatan mutu. Universitas Brawijaya melakukan publikasi hasil audit mutu di monitor elektronik, berikut adalah temuannya “PJM memiliki mekanisme monitoring berbasis IT (*close* dan *open system*)” PJM UB memiliki layar monitor mutu yang ditempatkan di gedung rektorat. Hasil audit mutu setiap prodi terpampang dimonitor tersebut. Jika prodi sudah melakukan perbaikan maka keterangan kondisi mutu menjadi *close* namun apabila prodi belum melakukan perbaikan aspek yang dipandang kurang maka keterangannya *open*.

Upaya yang dilakukan ITB untuk memacu peningkatan mutu pendidikan adalah dengan mengajukan sertifikasi mutu pada lembaga mutu internasional. Tujuan ITB melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional bahwa kualitas lulusan ITB setara dengan lulusan perguruan tinggi lainnya di dunia. Penjelasan Rektor ITB dalam media *on line* okezone.com yang terpublikasi tanggal 1 April 2013 “ITB lebih mengejar evaluasi kampus yang terinci dan spesifik seperti akreditasi internasional, karena akreditasi adalah system penilaian yang mendalam” selain alasan tersebut rektor memberikan alasan tambahan “agar alumni ITB lebih diakui dan mudah kerja di luar negeri, karena jika belum terakreditasi belum tentu system kerja luar negeri akan menerima lulusan ITB” (www.okezone.com/dahulukan-akreditasi-baru-peringkat-dunia; diakses 11 Agustus 2014).

Pada laman lain yaitu www.dikti.go.id tertanggal 7 september 2012 yang diposting pada rubrik berita pendidikan Dikti berjudul “ITB akan perbanyak Prodi berakreditasi internasional” disebutkan bahwa tahun 2012 terdapat dua prodi yang terakreditasi ABET yaitu teknik kimia dan teknik fisika. Prodi lainnya yang sudah terakreditasi ABET tahun sebelumnya adalah teknik elektro dan teknik kelautan.

Selain bekerjasama dengan ABET, ITB juga memiliki kerjasama dengan ABEST21 (*The Alliance of Business education and scholarship for Tomorrow, 21st Century Organization*) untuk mengakreditasi Sekolah Bisnis Manajemen (SBM). Sedangkan program S2 Arsitektur ITB mengajukan akreditasi ke badan akreditasi internasional KAAB (*Korean Architecture Accreditation Board*). Khusus untuk Prodi Teknik Kimia selain mendapatkan akreditasi ABET juga mendapatkan akreditasi dari *Royal Society of Chemistry* yang berpusat di Inggris. Fakultas lain yang juga mengajukan akreditasi internasional adalah Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMG) yang mengajukan akreditasi ke *Japan Accreditation Board* (JAB) (<http://www.dikti.go.id/id/2012/09/07/itb-akan-perbanyak-prodi-berkreditasi-internasional>, diakses 11 Agustus 2014).

Upaya yang dilakukan ITB merupakan langkah maju dari perguruan tinggi Indonesia. Persaingan kualitas perguruan tinggi tidak lagi dalam skala nasional namun sudah internasional, untuk itu sudah sepatutnya pengelola program studi di Indonesia bermitra dengan lembaga penjamin mutu internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terciptanya budaya akademik di kampus tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang dijadikan acuan di suatu kampus. Temuan penelitian menunjukkan semua kampus memiliki acuan nilai yang baku, seperti di kampus FIA UB terdapat 9 nilai integritas seperti Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, Adil. Di kampus ITB terdapat 8 norma akademik ITB dan 7 prinsip penilaian hasil belajar. Temuan terkait dengan nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kampus-kampus tersebut memiliki landasan dalam pengembangan perguruan tingginya. Nilai yang dijadikan pegangan juga berdampak terhadap budaya akademik yang berkembang di kampus masing-masing.

Integrasi pascasarjana di fakultas melahirkan suasana baru dalam proses interaksi akademik. Mahasiswa pascasarjana yang biasanya berinteraksi dengan sesama teman S2 atau S3 kini mereka harus berbaur dengan seluruh mahasiswa mulai dari S1 hingga S3. Keadaan tersebut secara perlahan juga turut mengubah

budaya akademik. Kebersamaan mahasiswa tidak hanya dalam interaksi sosial sebelum dan sesudah kuliah tetapi juga terjadi di dalam proses perkuliahan.

Temuan penelitian di kampus UB menunjukkan kebersamaan diantara mahasiswa S1, S2 dan S3 terjadi dalam kegiatan kuliah bersama, seminar dan bahkan pemanfaatan ruang baca pascasarjana yang juga sering didatangi mahasiswa S1. Semangat kebersamaan tersebut mendorong mahasiswa untuk mampu menyelesaikan perkuliahannya lebih cepat dan lebih baik kualitas karya akademiknya.

Temuan penelitian di kampus ITB menunjukkan perubahan budaya akademik diawali dari ruang laboratorium, mahasiswa FTI ITB pada umumnya menghabiskan banyak waktu di ruang laboratorium. Baik mahasiswa S1, S2 dan S3 bersama-sama mengoptimalkan fasilitas tersebut.

Proses lain yang dipandang berubah adalah proses interaksi diantara dosen dan mahasiswa. Di FIA UB, dosen tidak lagi membedakan mengajar antara di tingkat sarjana dengan master atau doktor. Dosen juga dipandang memiliki rasa tanggung jawab dalam pengembangan kualitas pascasarjana. Begitu halnya di kampus FTI ITB, dosen telah memberikan layanan yang sama, tidak ada lagi pandangan dosen pasca dan dosen sarjana.

Hasil penelitian di kedua kampus yang melaksanakan pascasarjana terintegrasi di fakultas menunjukkan adanya perubahan peran yang dijalankan PPs atau istilah lain SPs. Perubahan peran dimaksud adalah PPs/SPs berperan dalam penjaminan mutu pendidikan pascasarjana. Dalam melaksanakan peran tersebut PPs/SPs membentuk suatu komisi mutu, peran dari komisi mutu ini adalah merumuskan sejumlah standar dalam proses layanan akademik. Penjaminan mutu yang dilakukannya pun hanya terkait masalah akademik. Sedangkan untuk masalah non-akademik proses penjaminan mutu dilakukan oleh satuan penjamin mutu yang dibentuk oleh universitas.

Tindak lanjut dari hasil penjaminan mutu dilakukan oleh kedua perguruan tinggi dengan kebijakan yang beragam. UB menindaklanjuti hasil penjaminan mutu dengan melaporkan ke rektor dan prodi terkait untuk diperbaiki. Selain menyampaikan rekomendasi, UB juga mendisplay temuan penelitian di monitor PJM yang ada di gedung rektorat. Komponen yang sudah diperbaiki oleh

prodi akan diberi keterangan *close* sedangkan komponen rekomendasi yang belum diperbaiki diberikan keterangan *open*. Mekanisme ini dipandang akan mampu mengingatkan secara terus menerus prodi yang belum memperbaiki aspek yang direkomendasikan PJM.

Kampus ITB menetapkan suatu standar kualitas yang sangat tinggi, selain melakukan penjaminan mutu internal oleh lembaga mutu yang ada di ITB, proses penjaminan mutu juga dilakukan oleh lembaga mutu internasional. Penjaminan mutu internasional dimaksudkan agar lulusan ITB sejajar dengan perguruan tinggi internasional dan lulusan ITB juga dapat bekerja di perusahaan internasional.

Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

- a. Integrasi pascasarjana ke fakultas melahirkan permasalahan seperti standar pelayanan akademik yang beragam, penghormatan tenaga pendidik yang beragam dan membutuhkan payung hukum yang jelas. Berdasarkan kepada fakta lapangan tersebut peneliti menyarankan untuk membuat kesepakatan antara Kaprodi, Dekan dikoordinir oleh Direktur Pascasarjana untuk menyusun standar akademik yang baku disesuaikan dengan tujuan universitas, fakultas dan jurusan/prodi. Standar penghormatan juga harus disepakati rentang nominalnya agar tidak terjadi tumpang tindih diantara fakultas. Terkait dengan peraturan, integrasi pascasarjana hendaknya tidak dilakukan secara serentak, tetapi harus sistematis mulai dari menyiapkan payung hukum, kebijakan pendukung dan petunjuk pelaksana yang jelas.
- b. Perubahan struktur organisasi perguruan tinggi pada dasarnya bukan sesuatu yang tabu, seperti yang dilakukan ITB dengan menghapus keberadaan jurusan dan mengganti dengan kelompok keahlian. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk pengembangan kualitas dosen. Namun, bagi perguruan tinggi lain kebijakan tersebut bukan hanya untuk ditiru tetapi harus dilakukan pengkajian matang apakah kebijakan tersebut sesuai atau tidak dengan kondisi dan potensi perguruan tinggi.

- c. Pola komunikasi *flat* diantara dosen, mahasiswa dan pejabat kampus seperti yang diterapkan di ITB nampaknya harus dikembangkan pula di kampus lain. Pola seperti itu telah menghasilkan suasana akademik yang kondusif dan saling membantu diantara civitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
- d. Orientasi mutu internasional dengan mendapatkan sertifikat internasional merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pencapaian mutu internasional bukan hanya milik ITB, perguruan tinggi lain pun berhak mendapatkan sertifikat tersebut. Jika orientasi program studi sudah internasional maka lulusan perguruan tinggi lokal dapat diterima di dunia kerja internasional.
- e. Untuk menciptakan suasana kebersamaan diantara mahasiswa S1, S2 dan S3 serta rasa tanggung jawab yang besar dari para dosen terhadap pendidikan berkualitas yang equal antara tingkat sarjana hingga doktor, diperlukan adanya beberapa upaya, seperti: menyelenggarakan seminar umum, memberikan akses yang luas untuk memanfaatkan perpustakaan pascasarjana walaupun keberadaannya pada dasarnya diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana, memberikan beban mengajar yang sama diantara dosen senior dan junior. Mengajar di S1, S2 dan S3 bebannya sama dan penghargaannya pun sama, sehingga dosen tidak lagi mengesampingkan tanggung jawab mengajar di tingkat S1.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, B. L. 2004. *Qualitative Research Methode*. Boston: Pearson.
- Chen, S. H. 2012. The Establishment of a Quality Management System for The Higher Education Industry. Published online: 25 March 2011 © Springer Science+Business Media B.V. 2011. Melalui [www. au.edu](http://www.au.edu) diakses 2 Februari 2012.
- Hassan. 2013. Quality Assurance in Higher Education in 20 MENA Economies. *Higher Education Management and Policy Journal Volume 24/2* © OECD 2013.

Kim, S dan Ju Ho Lee. 2004. *Changing Facets of Korean Higher Education: Market Competition and the Role of the State*. paper has been presented at the workshop, "Upgrading Korean Education in the Age of Knowledge Economy: Context and Issues" sponsored by Korea Development Institute and the World Bank. Diakses melalui www.uwm.edu tanggal 23 Oktober 2008.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Somantri, G. R. 2005. "Memahami Metode Kualitatif". *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 57-65. melalui http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/03_METODE PENELITIAN KUALITATIF_Revisi-ybs.pdf Diakses 26 Desember 2009.

Spreadley, P. J. 1997. *The Ethnographic Interview*. Alih Bahasa Misbah Zulfa Elisa. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Thamrin. 2012. Karakter Budaya Akademik dan Hubungannya dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi FE Universitas Negeri Medan. *Jurnal Mediasi Vol 4 No. 1 Juni 2012*. (on line) melalui www.unimed.ac.id/jurnal. Tanggal 24 februari 2014.

Twomey. Etc. (ed). 2009. *Pedagogy, not Policing Positive Approaches to Academic Integrity at The University*. New York: The Graduate School Press of Syracuse University. (on line) melalui www.en.bookfi.org tanggal 24 Februari 2014.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Wiyono, B. B. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Action Research*. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.